

Judul : Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi
Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi

CANBERRA – Kepercayaan publik saat ini dapat dikatakan merupakan tantangan bagi demokrasi. Menurut Elderman Trust Barometer 2019, masyarakat masih memandang pemerintah dan media sebagai lembaga sosial yang paling tidak dapat dipercaya dibandingkan dengan LSM dan lembaga usaha.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengungkapkan hal tersebut dalam forum tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia, kemarin. "Mengembalikan kepercayaan publik dan menguatkan integritas adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kita semua demi meningkatkan standar pelayanan lembaga publik dan melindungi kredibilitas mereka," papar Fadli Zon yang juga anggota Komisi 1 DPR ini.

Kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan sidang APFF yang akan berakhir pada Kamis (16/1). Fadli mengungkapkan bahwa semua menyaksikan tuntutan masyarakat di seluruh dunia terus berubah. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak terjadi demonstrasi publik dan protes di seluruh dunia. Mereka menginginkan perubahan dalam pemerintahan di negara masing-masing.

Setiap gerakan tersebut memiliki latar belakangnya sendiri, mulai kenaikan tarif hingga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik. "Semua ini mengakibatkan kepercayaan publik yang terus menurun dan melemahnya integritas kita," tandas mantan Wakil Ketua DPR ini.

Indonesia percaya bahwa integritas yang lebih kuat adalah kunci untuk mengatasi korupsi di mana pun. Untuk itu, standar integritas haruslah mengadopsi unsur-unsur sebagaimana termaktub di dalam Komitmen Santiago untuk memerangi korupsi dan memastikan transparansi yang dicapai dalam APEC 2004. Unsur-unsur itu meliputi transparansi yang lebih baik, tata kelola yang lebih berkualitas, dan sistem yang lebih kuat untuk melawan



DWI SASONGKO
Laporan
Wartawan
SINDO Media
Canberra

sional terus mendorong rezim keterbukaan. Sebagai pionir Open Government Partnership (OGP), Indonesia kini merupakan salah satu dari sedikit negara yang telah memiliki rencana aksi keterbukaan, baik di sisi pemerintah maupun parlemen. Rencana aksi ini pun telah mencapai siklusnya yang kelima, yaitu untuk 2018-2020.

Selain itu, untuk memastikan inisiatif ini terlaksana, pemerintah telah membentuk tim khusus Open Government Indonesia (OGI) dan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menguatkan praktik pemerintahan terbuka di Indonesia. Langkah-langkah keterbukaan dimaksudkan sebagai pendorong menuju tata kelola yang baik dan kuat, serta kepercayaan publik yang lebih tinggi.

"Kami pun telah mengesahkan UU Keterbukaan Informasi No 14/2008 sebagai salah satu prasyarat mengedepankan keterbukaan. Selain itu, perumusan Kebijakan Satu Data dan Saran Pelaporan Publik Laporan (www.lapor.go.id) secara konkret memperlihatkan bagaimana keterbukaan bisa mendorong tata kelola yang lebih baik atas pelayanan publik," paparnya.

Fadli melanjutkan, pada 2018, DPR mengambil bagian dalam penyusunan langkah-langkah keterbukaan parlemen melalui Rencana Aksi Keterbukaan Parlemen. Terdapat beberapa aksi yang dilaksanakan melalui peluncuran Sistem Informasi Legislasi (Sileg 2.0) yang lebih mudah dan nyaman digunakan serta memberikan informasi transparan meng-



Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon (tengah) didampingi Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (kiri) dan anggota DPR Himmatul Aliyah (kanan) saat hadir dalam forum tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia, kemarin.

trasi, yang menuntut agar DPR menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel, "tuturnya. Melalui data yang disajikan, platform ini juga dapat membantu verifikasi fakta terkait berbagai isu legislasi yang mungkin diberitakan secara ambigu di platform daring/media sosial.

Menurut Fadli, ke depan, sedang dipertimbangkan penerapan legislasi elektronik sebagai sarana partisipasi publik untuk menjadikan proses pembuatan kebijakan lebih inklusif dan terbuka bagi keikutsertaan masyarakat. "Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah penguatan integritas berarti juga mendorong transparansi untuk menutup peluang penyalahgunaan badan hukum mana pun untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, dan korupsi," ujarnya.

men (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengajukan tiga rekomendasi. Di antaranya legislasi nasional harus dibangun berdasarkan budaya damai sebagai upaya ikut memajukan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Di mana, produk hukum yang tercipta harus berkontribusi membangun, menumbuhkan, dan membina perdamaian itu sendiri.

Rekomendasi kedua, perlu ada fokus di dalam legislasi nasional yang mendukung implementasi efektif tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang merata, dan penurunan kesenjangan antarnegara di kawasan. "Satu lagi, dibutuhkan legislasi nasional yang bisa menjadi dasar bagi implementasi efektif berbagai komitmen internasional mengenai perdamaian dan keamanan, yang sejalan dengan prioritas dan kerangka hukum nasional," kata Putu.

terkait Peraturan PBB. Putu juga menekankan adanya peran APFF dalam mendorong kerja sama parlemen sebagai katalis perdamaian dan mitigasi ancaman keamanan.

Keterlibatan semua negara APFF adalah wadah untuk mencari titik temu persepsi terhadap isu-isu keamanan yang sedang mengemuka. "Melalui dialog dalam pertemuan ini, saya percaya kita mampu menguatkan diplomasi parlemen sebagai cara penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan, serta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan," ungkapnya.

Saat ini, menurut dia, semua merasakan dunia begitu terhubung. Dibalik itu, ada risiko berbagai ancaman yang melampaui batas-batas negara dan yang berdampak terhadap populasi global. "Membangun perdamaian dan mengupayakan keamanan yang memadai di

tingkat nasional dan internasional termasuk anggota parlemen, lanjutnya, juga sangat penting. Anggota parlemen bisa berkontribusi pada arsitektur perdamaian dan keamanan melalui berbagai cara konstruktif, baik pada situasi konflik maupun pascakonflik. Saat terjadi konflik, parlemen dapat bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan.

Sementara itu, pada situasi pascakonflik, parlemen bersama dengan pemerintah memainkan peran penting mempertahankan perdamaian dan menyediakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. "Pada skala yang lebih luas, keberadaan parlemen dalam hal ini turut melindungi prinsip inklusivitas di alam demokrasi," paparnya.

Putu juga mengungkapkan, perdamaian dan keamanan adalah dua komponen yang amat penting dalam menjaga kesta-

dasawarsa terakhir, Asia Pasifik tumbuh menjadi kawasan yang relatif damai dan stabil. Namun demikian, keadaan ini tidak boleh membuat terlena.

Seiring dengan dinamika kawasan, terdapat risiko terjadi konflik yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan perekonomian. Putu mengatakan, sejak hari kemerdekaan, Indonesia selalu berkeinginan kuat untuk ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Menjadi bagian dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB adalah salah satu bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian.

Selain itu, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB saat ini, Indonesia hendak mendorong pendekatan yang komprehensif dan holistik terhadap diplomasi global. "Kami berkomitmen menjadi mitra sejati bagi perdamaian dunia dengan ber-